

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
		Sepur)	Fungsi 2. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi 3. Rencana Struktur Ruang 4. Rencana Pola Ruang 5. Rencana Pemanfaatan Ruang 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan 8. Indikasi Program														
12.	Peraturan Menteri	Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi (App CITES)	a. Jenis-jenis kegiatan pemanfaatan; b. Perizinan (Jenis, Persyaratan, Tata Cara, Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian; c. Pengangkutan dalam negeri; d. Pengangkutan ke luar negeri; e. Pelaporan; f. Pengawasan dan Sanksi; g. Pembinaan, Data dan Informasi, dan Sosialisasi; h. Koordinasi dan														Luncuran Prosun 2017

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
			Pengendalian														
13.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Ditjen PRL	a. Kedudukan; b. Tugas dan fungsi; c. Klasifikasi; d. Wilayah kerja; e. Lokasi; dan f. Struktur organisasi.														Luncuran Prosun 2017
14.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan Tata Cara Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a. persyaratan; b. tata cara; c. berakhirnya, Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan														menunggu diterbitkannya PP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
15.	Peraturan Menteri	Larangan Pengeluaran Ikan Pari Mobula dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara RI	a. larangan mengeluarkan ikan Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) serta produk pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia; b. masa berlaku pelarangan sampai dengan tanggal 30 April 2018														Luncuran Prosun 2017
16.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a. pengusulan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat; dan b. proses penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum														Luncuran Prosun 2017

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
			Adat;													
17.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai	a. Penghitungan batas sempadan pantai; b. Penghitungan lebar sempadan pantai													Luncuran Prosun 2017
18.	Peraturan Menteri	Tata Cara Survei, Pengangkatan, dan Pemanfaat Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam oleh Pemerintah	a. pengelolaan BMKT dilaksanakan dengan: survei, pengangkatan, dan pemanfaatan; b. dalam rangka survei dan pengangkatan BMKT, PANNAS BMKT membentuk Tim Kerja Survei; dan c. penggunaan dan pemanfaatan BMN													Luncuran Prosun 2017
19.	Peraturan Menteri	Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (<i>Carcharhinus longimanus</i>) dan Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>), dari Wilayah Negara Republik Indonesia	a. Larangan pengeluaran ikan Hiu Koboi (<i>Carcharhinus longimanus</i>) dan Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) serta produk pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia b. masa berlaku													Luncuran Prosun 2017

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
		Barat)															
38.	Keputusan Menteri	Kawasan Konservasi Maritim (KKM) HMAS Perth dan USS Houston di Perairan Provinsi Banten	<p>a. penetapan situs kapal tenggelam HMAS Perth dan USS Houston sebagai Kawasan Konservasi Maritim;</p> <p>b. Kawasan Konservasi Maritim di Perairan Provinsi Banten dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zona inti; dan 2. zona pemanfaatan terbatas; 														Luncuran Prosun 2017
39.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu	<p>a. penetapan ikan hiu yang terdiri dari 112 (seratus dua belas) spesies sebagai jenis ikan yang dilindungi;</p> <p>b. perlindungan ikan hiu dengan status perlindungan terbatas berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sebagian tahapan siklus hidup; dan 														Luncuran Prosun 2017

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
			2) wilayah sebaran tertentu;															
40.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu	a. penetapan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan Tahun 2018 – 2022; b. Strategi, Kegiatan, Indikator, Output, Lokasi, Waktu dan Pelaksana.															
41.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Napoleon																Luncuran Prosun 2017
42.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Terubuk																
43.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Bambu Laut																
44.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Pari Manta																
45.	Keputusan Menteri	Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Mamalia Laut	Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Mamalia Laut Tahun 2018-2022															
46.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Ikan Mola-Mola	Penetapan Status Perlindungan Ikan Mola-Mola															
47.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Mentawai	a. Penetapan sebagian perairan Selat Siberut, Teluk Katurai I, dan Teluk Katurai II di Provinsi Sumatera Barat sebagai Kawasan														Luncuran Prosun 2017	

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penanganan Tindak Pidana Perikanan	a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Penyidikan; c. Penanganan Barang Bukti; dan d. Penanganan awak kapal perikanan.													Luncuran Proleg 2017
2.	Peraturan Menteri	Tindakan Khusus Peneggelaman Kapal Berbendera Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan	a. dasar tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang Perikanan; b. prosedur tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing; dan c. pelaporan.													Luncuran Prosun 2017
3.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Acuan baku bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta untuk menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi berbasis kompetensi kerja pada bidang pnaatan peraturan													Luncuran Prosun 2017

6. Inspektorat Jenderal

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengaturan secara rinci khususnya penggunaan aplikasi terintegrasi dengan web LAPOR milik Kantor Staf Presiden														Mencabut Permen KP Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan <i>Whistleblower</i> dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pengolahan ikan tuna														
21.	Keputusan Menteri	Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Garam														
22.	Keputusan Menteri	Uraian Jabatan dan Peta Jabatan Lingkup BRSDM														

DRAFT

8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Manajemen Resiko Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan dan/atau Hasil Perikanan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	a. Menajemen resiko terhadap media pembawa dan/atau hasil perikanan yang masuk ke wilayah Indonesia; b. Penentuan tingkat resiko; c. Analisis resiko; dan d. Hasil analisis resiko menentukan dapat tidaknya media pembawa dan/atau hasil perikanan masuk instalasi karantina untuk dilakukan tindakan karantina dan pengendalian mutu													Luncuran Prosun 2017
2.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu	a. Persyaratan permohonan penerbitan sertifikat; b. Tata cara penerbitan sertifikat; c. Pemeringkatan sertifikat; dan d. Perpanjangan masa berlaku.													Luncuran Prosun 2017
3.	Peraturan Menteri	Pengeluaran Media Pembawa Hama dan	a. Penggabungan sertifikat kesehatan													Luncuran Prosun 2017

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
			Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.266/M.PPN/04/2002, Tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana														

DRAFT

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
		Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<i>Regulatory Impact Analysis</i> sebagai amanat Permen KP Nomor 49/PERMEN-KP/2017.													
7.	Keputusan Menteri	Perubahan atas Kepmen KP Nomor 4/KEPMEN-KP/ 2016 tentang <i>Road Map</i> RB KKP 2015-2019	Berisi updating 9 (sembilan) program <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan													

DRAFT

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Tata Cara Pengamanan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengamanan BMN dari aspek administrasi, fisik dan hukum														

DRAFT

15. Pusat Data, Statistik, dan Infomasi

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Master Plan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022	Rencana strategis kebijakan teknologi informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022													
2.	Peraturan Menteri	Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Standar operasional dan prosedur penggunaan dan penanganan teknologi informasi													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Karo Hukum dan Organisasi	